

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sanksi penundaan atau penghentian jaminan sosial pada WNI yang tidak bersedia diberikan vaksin COVID-19. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ini adalah yuridis normatif yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma di dalam hukum positif untuk mengangkat, membahas, dan menguraikan isu hukum yang diangkat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 setiap warga negara berhak mendapat jaminan sosial, hak untuk memnetukan hidupnya sendiri dan hak atas kebebasan berpendapat. Di tahun 2019-2023 terdapat wabah yg mendunia yaitu COVID-19. Virus tersebut secara cepat menular memulai kontak langsung maupun tidak langsung (udara). Indonesia sebaga negara yg terdampak virus COVID-19 melakukan upaya pengobatan dan juga pencegahan guna melindungi setiap warga negara yg diamanatkan oleh UUD 1945. Pemerintah melalui Perpres NO 14. Tahun 2021 tentang Pengadaan vaksinasi terhadap warga negara, dinilai merupakan langkah yg tepat untuk mengendalikan wabah virus Covid-19. Pengobatan gratis berupa karantina & juga pemberian vaksin sudah diterapkan. Namun pada kenyataannya pemberian vaksin terhadap manusia terdapat suatu gejala yg timbul yakni kelumpuhan hingga kematian.

Keywords : COVID-19; Sanksi; Jaminan sosial



ABSTRACT

This study was conducted to determine the application of sanctions for delaying or terminating social security on Indonesian citizens who are not willing to be given the COVID-19 vaccine. In this study, the method used is normative juridical which is focused on the application of rules or norms in positive law to raise, discuss, and elaborate the legal issues raised. Article 28 of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to social security, the right to determine his own life and the right to freedom of opinion. In 2019-2023, there is a global outbreak, namely COVID-19. The virus is rapidly contagious, initiating direct or indirect (airborne) contact. Indonesia as a country affected by the COVID-19 virus has taken treatment and prevention efforts to protect every citizen mandated by the 1945 Constitution. Government through Presidential Decree NO 14. In 2021 regarding the procurement of vaccinations for citizens, it is considered the right step to control the outbreak of the Covid-19 virus. Free treatment in the form of quarantine and also the provision of vaccines has been implemented. But in fact, the provision of vaccines to humans has a symptom that arises, namely paralysis to death.

Keywords : COVID-19; Penalty; Social security

